

IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KECAMATAN PAUH DUO

Wulan Insan Kamillia^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}wulaninsankamillia@gmail.com, ^{b)}jumiati@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

03-01-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Implementasi Program,
Asuransi, Usaha Tani Padi

Keywords:

Program Implementation,
Insurance, Rice Farming
Business

Corresponding Author:

wulaninsankamillia@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.245>

PENDAHULUAN

Sumber daya alam Indonesia sangat kaya, salah satunya dalam sektor pangan di pertaniannya, sehingga Indonesia seringkali disebut sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian atau pertanian menurut Badan Pusat Statistik (Tempo, 2024). Dengan rincian pada kuartal I-2023 merupakan jumlah penduduk yang bekerja

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis implementasi menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program AUTP di Kecamatan Pauh Duo belum optimal. Dari enam variabel yang diteliti, tiga variabel telah terimplementasi dengan baik, yaitu sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan sikap para pelaksana. Sementara itu, tiga variabel lainnya masih mengalami kendala, meliputi: standar dan sarana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, serta kondisi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek standarisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan implementasi Program AUTP di Kecamatan Pauh Duo.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Rice Farmer Business Insurance Program (AUTP) in the Pauh Duo Sub-district, including identifying its supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews and documentation. The implementation analysis uses the theory of Van Meter and Van Horn (1975). The result shows that the implementation of the AUTP Program in the Pauh Duo Sub-district has not been optimal. Of the six variables studied, three variables have been well implemented: resources, characteristics of implementing agents, and attitudes of implementers. Meanwhile, the other three variables still experience obstacles: policy standards and means, inter-organizational communication and activity strengthening, and political, economic, and social environmental conditions. This finding indicates the need for policy standardization improvement and coordination among stakeholders to optimize the implementation of the AUTP Program in the Pauh Duo Sub-district.

di bidang pertanian mencapai 29,36 persen, naik menjadi 28,64 persen pada kuartal I-2024, naik 0,03 juta dari total 142,18 juta penduduk Indonesia yang bekerja.

Akan tetapi sehubungan dengan hal itu di lansir dari Produksi beras Indonesia menurun dari tahun ke tahun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2023, konsumsi pangan penduduk diperkirakan mencapai

sekitar 30,90 juta ton. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 645,09 ribu ton atau 2,05% dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2022, yang tercatat sebanyak 31,54 juta ton. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor, diantaranya resiko iklim pada usaha tani padi, iklim ekstrem dapat menyebabkan berbagai bahaya gagal panen, seperti kebanjiran pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, terdapat 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari seluruh bencana yang terjadi pada Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir di Indonesia pada tahun 2023 menyebabkan 5.469 hektar tanaman berdampak tersebar diberbagai Provinsi di Indonesia, hingga tahun 2024 masih terjadi bencana-bencana alam lainnya yang memicu kehilangan lahan tani akibat bencana alam yang terjadi.

Jadi, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara resmi menerbitkan program Asuransi Usaha Tani Padi atau dikenal dengan AUTP. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Asuransi Pertanian menegaskan kebijakan ini sebagai bentuk advokasi petani untuk melindungi usaha pertaniannya. “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha pertanian yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”, menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (Mastini, 2023).

Kemudian setiap wilayah di Indonesia yang berpotensi tentunya diharapkan menjalankan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Tak terkecuali provinsi Sumatera Barat. Dengan produksi beras sebesar 843.297 ton, Dari sepuluh provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat penghasilannya, provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-10. Beberapa kabupaten yang ikut menjalankan program AUTP yaitu Kabupaten Solok, sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Barat, telah mengikuti program ini sejak 2017 dengan luas sawah yang diasuransikan mencapai 3.077,84 (Luthfi Fakhruzi 2023). Selain itu sebanyak 500 hektar (ha) lahan pertanian padi di Kota Payakumbuh, juga ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal tersebut menunjukkan wilayah pertanian di Sumatera Barat berpotensi terhadap Program AUTP.

Penelitian kali ini akan berfokus pada Kabupaten Solok Selatan karena merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang juga memiliki banyak sentra produksi padi atau beras. dan lebih spesipik di Kecamatan Pauh Duo. Kabupaten Solok Selatan mempunyai wilayah dengan luas lahan sawah dan pertanian yang luas (Ha), Kabupaten Solok Selatan memiliki luas lahan pertanian 420.254 Hektar. Dari 420.254 Hektar luas lahan pertanian komoditi sawah adalah 9.080 Hektar. Data tersebut menunjukkan jumlah yang cukup luas.

Akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu menurunnya tingkat kepesertaan petani untuk mengambil bagian dalam Program Asuransi Tani Padi Kecamatan Pauh Duo, penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022-2024

| No | Kenagarian | Tahun | | | Jumlah Peserta AUTP |
|--------|--------------------------|-------|------|------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Alam Pauh Duo | 2 | 3 | - | 5 |
| 2 | Kapau Alam Pauh Duo | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | Luak Kapau Alam Pauh Duo | 3 | 1 | - | 4 |
| 4 | Pauh Duo Nan Batigo | 1 | 1 | - | 2 |
| JUMLAH | | 7 | 6 | - | 13 |

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan

Permasalahan kedua, yaitu kurangnya tingkat kepatuhan peserta terhadap program. Permasalahan ketiga, implementasi program belum berhasil memberikan perlindungan kerugian kerusakan karena proses klaim yang begitu lama dari pihak asuransi dan juga petugas pertanian terkait, untuk melakukan pemeriksaan kerusakan lahan.

Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana Implementasi Program Asuransi Usaha Tani (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang dikaji. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pauh Duo, dengan fokus utama pada melihat dan deskripsi implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah tersebut. Penelitian ini didasarkan pada teori model implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengidentifikasi enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. dan politik. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga membandingkan dengan Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kapasitas organisasi, serta strategi implementasi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Model Edward III, yang menyoroti empat faktor utama dalam implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, sikap pelaksana.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer, yaitu dari pentingnya informan, dan data sekunder dari dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan keterkaitan langsung mereka dengan implementasi Program AUTP di Kecamatan Pauh Duo. Informan utama terdiri dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Kepala UPTD dan BPP Pertanian Kecamatan Pauh Duo, Penyuluh Pertanian, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Unit Divisi Agri PT. Jasaindo Cabang Solok Selatan, serta petani yang mengikuti dan tidak mengikuti Program AUTP. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam program ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan terkait implementasi kebijakan AUTP di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi validitas data yang dikumpulkan. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik validasi selain triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Patton, 1999). Audit trail diterapkan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara rinci, sehingga data dapat ditelusuri dan diverifikasi (Merriam & Tisdell, 2016). Untuk memastikan keabsahan

data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik validasi selain triangulasi sumber. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Miles, Huberman & Saldana (2014), yang mencakup : (1) penyiapan atau reduksi data, yaitu dilakukan dengan memilah dan menyaring data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar hanya data yang relevan digunakan dalam analisis. (2) Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antarvariabel dalam implementasi Program AUTP. Selanjutnya, (3) penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan yang digunakan, sehingga dapat menjelaskan keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program di Kecamatan Pauh Duo. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prpgram Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi AUTP di Kecamatan Pauh Duo masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi, proses klaim yang lama, dan standar klaim yang dianggap terlalu tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutanto (2021) di Jawa Tengah yang mengungkapkan bahwa keberhasilan AUTP sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi dan pendampingan kepada petani. Studi lain oleh Qomara, K. F. (2021) di Kalimantan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi AUTP. Namun, dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, yang telah mengembangkan sistem digitalisasi klaim untuk mempercepat proses pencairan asuransi, implementasi di Kecamatan Pauh Duo masih belum optimal. Dengan demikian, penting untuk memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antarorganisasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan terhadap studi implementasi kebijakan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dapat berhasil jika terdapat standar dan tujuan kebijakan yang jelas, sumber daya yang

memadai, komunikasi yang efektif, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung. Menurut temuan khusus dalam penelitian ini, menggunakan teori kebijakan Van Meter dan Horn (1975), ada enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan Van Meter dan Horn (1975)

Dalam rangka Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), standar dan sasaran program telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang telah menerbitkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Standar ini mencakup kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Sasaran kebijakan merujuk kepada tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui implementasi program. Dalam implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, peneliti menemukan berbagai yang menghambat tercapainya sasaran dari program tersebut. Salah satunya yaitu dalam hal standar kebijakan, seharusnya standar kebijakan mencakup persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani agar bisa mengikuti program asuransi ini, seperti jenis kerugian yang bisa diklaim dan tingkat kerusakan lahan, dalam pelaksanaannya Program AUTP di kecamatan Pauh Duo ditemukan fakta bahwa petani merasa standar yang diberikan kurang tepat, untuk mendapatkan kompensasi, Program AUTP menetapkan batas minimal klaim kerusakan lahan sebesar 70%. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang mengalami kerugian besar karena hama, penyakit tanaman, atau bencana alam akan menerima kompensasi. Petani yang mengalami kerusakan yang lebih rendah, seperti setengah, tidak menerima kompensasi, yang membuat mereka kecewa karena mereka terus mengalami kerugian. Dampak dan ketidakpuasan petani mungkin menganggap ketentuan ini tidak adil karena mereka masih menghadapi risiko dan kerugian dalam usaha pertanian, meskipun

tidak memenuhi syarat 70%. Bagi mereka, kehilangan 50% hasil panen tetap merupakan kerugian yang besar, dan jika tidak ada kompensasi, usaha pertanian mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Hal tersebut juga disampaikan penyuluh bahwa terkait hal ini penyuluh juga setuju untuk pemerintah dapat menerima keluhan petani dan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk ketentuan klaim.

Sumber Daya

Menurut Agustino (2006), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam implementasi kebijakan sumber daya yang dibutuhkan berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas dan waktu. Sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) meliputi tersedianya petugas-petugas penyelenggara program seperti Penyuluh Pertanian, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), dan petugas PT. Jasindo dari pihak Asuransi. Kemudian dukungan dari pemerintah dalam hal pembayaran premi pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% dari keseluruhan sehingga sangat meringankan petani dalam hal pembayaran premi. Petugas yang telah diberi tanggung jawab sudah siap dengan pemahaman program. Selain ketersediaan staf dan informasi, sumber daya lainnya adalah fasilitas pendukung menunjang pelaksanaan program AUTP diciptakan fasilitas pelayanan secara online. Berdasarkan pembahasan dari subfokus yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya telah diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan Program AUTP di Kecamatan Pauh Duo. Petugas memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap program ini, dan dalam pelaksanaannya, fasilitas pendukung yang disediakan, termasuk layanan berbasis online, telah membantu menunjang kelancaran implementasi program online.

Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktifitas

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) adalah adanya komunikasi yang terjalin antar organisasi. Komunikasi antar organisasi dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berjalan cukup baik. Dinas Pertanian sebagai pelaksana utama program ini

berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Balai Penyuluh Pertanian, petugas lapangan penyuluh pertanian, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) kelompok tani, dan petani individu. Akan tetapi, tetap ada beberapa permasalahan dalam hal komunikasi berkaitan dengan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada petani atau masyarakat, peneliti menemukan dilapangan masih ada petani yang belum mengetahui program, dan pun petani yang sudah pernah mengikuti program tapi tingkat pemahaman petani terhadap program belum sepenuhnya paham, hal ini tentunya menjadi evaluasi dalam menjalankan program ini. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak terkait sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa evaluasi untuk konsistensi belum konsisten dengan petani dan masyarakat, dan jadwal rutin yang jelas dan harusnya dilakukan secara lebih kontinyu atau terus – menerus, karena hal tersebut perlu diperhatikan agar pelaksanaan program AUTP di Kecamatan Pauh Duo dapat diimplemtasikan dengan baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Agustini (2008) menyatakan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat dalam implementasi kebijakan. Dalam menjalankan sebuah Kemudian dalam mengimplementasikan program AUTP ini, pelaksana program terdiri dari beberapa pihak dengan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tingkat kecamatan, yaitu penyuluh pertanian, petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang ada disetiap kecamatan, Kepala UPTD/BPP Pertanian, di tingkat kabupaten ada Kepala Dinas, lalu dari pihak asuransi yakni PT. Jasindo, Kemudian terakhir yaitu Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan itu dalam implementasi program AUTP di Kecamatan Pauh Duo, peneliti menemukan bahwa ada satu hal yang masih menjadi hal yang penting ditingkatkan oleh para pelaksana program yaitu dalam hal konsistensi menjalankan program, dapat kita pahami bahwa dalam konteks mengimplementasikan program AUTP ini, karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi bagaimana program dijalankan dengan motivasi yang kuat, karena agen pelaksana merupakan garda terdepan untuk menjalankan kebijakan atau program sesuai

dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi motivasi harus diiringi dengan konsisten juga, konsisten sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan pelaksanaan program secara terus-menerus.

Sikap para Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Augustine (2006), “sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik.” Hal tersebut tentunya berlaku dalam pengimplementasian program Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, para pelaksana haruslah menunjukkan semangat dan komitmen yang besar untuk menjalankan program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap positif dipengaruhi oleh pemahaman akan pentingnya program ini bagi kesejahteraan petani dan bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Beberapa bagian dari dukungan tersebut termasuk penyediaan sumber daya, bantuan teknis, dan membantu koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam program. Para pelaksana menyadari bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan teknis pertanian kepada petani tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terakhir bahwa sikap yang baik dari para petugas pelaksana dalam menjalankan program, dibuktikan dengan para pelaksana mengupayakan memberikan pemahaman kepada petani, dan terus memberikan tanggapan dan respon terkait hal-hal yang berhubungan dalam terlaksananya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dari segi lingkungan ekonomi, sosial di Kecamatan Pauh Duo sudah cukup mendukung pelaksanaan Program AUTP, Dari wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dari segi ekonomi dan sosial masyarakat mendukung, terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama dalam hal lingkungan politik. Pergantian pimpinan daerah, dapat mempengaruhi keberlanjutan program ini, apakah masih menjadi program yang tetap diprioritaskan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh

Duo, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, baik faktor yang mendukung maupun yang menjadi hambatan. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut :

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah elemen-elemen yang memperkuat atau memperlancar pelaksanaan kebijakan. Dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, Terdapat beberapa factor yang memberi kemudahan bagi pemerintah dalam mengelola dan menjalankan program. Factor yang pertama yaitu dalam segi regulasi yang jelas, regulasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini memberikan pedoman atau panduan yang yang jelas sehingga semua pihak yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap program, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai pihak-pihak UPT/BPP ditingkat kecamatan, hingga sampai ke petani sebagai sasaran utama program sudah diatur dalam pedoman dan panduan yang langsung dikeluarkan oleh kementerian pusat dan seragam seluruh Indonesia. Faktor pendukung yang kedua adalah kemudahan akses teknologi, dalam proses pelaksanaan program, terkhusus pendaftaran petani sudah dilakukan secara online yaitu melalui aplikasi pelayanan asuransi petani (SIAP), hal ini memudahkan proses pendaftaran karena dilakukan secara online dan dibantu oleh petugas penyuluh pertanian.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah elemen-elemen yang menghalangi atau memperlambat pelaksanaan kebijakan. Dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, terdapat beberapa factor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ini. Pertama yaitu diidentifikasi dari unsur standar kebijakan, yaitu dalam hal ketentuan syarat pengajuan klaim yang diajukan petani, dimana ketentuan tingkat kegagalan panen sesuai pedoman program, harus mencapai 70% baru disetujui, sedangkan petani merasa standar itu terlalu tinggi untuk dijadikan patokan, karna kerusakan 50% saja petani sudah dibuat kewalahan akibat kerugian panen, petugas juga sependapat dengan petani, standar tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan. Kemudian faktor kedua adalah tidak adanya penjadwalan rutin sosialisasi atau penyampain

infomasi terkait program AUTP kepada petani-petani sebagai sasaran utama program. Konsistensi dari petugas pelaksana terutama penyuluh dan petugas terkait di daerah Kecamatan sangat diperlukan, sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan bahkan dengan cara yang inovatif dapat membantu menyelesaikan masalah minat petani yang kurang terhadap program, sehingga sosialisasi yang terus menerus harapannya bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap program.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis lapangan mengenai pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Pauh Duo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan dan belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta program mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi program.

Penurunan peserta program ini menandakan adanya beberapa permasalahan utama dalam implementasi AUTP, di antaranya: (1) standar ketentuan syarat klaim yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi petani, terutama batas minimal kerusakan 70% yang dianggap terlalu tinggi; (2) kurangnya sosialisasi rutin atau penyampaian informasi kepada petani sebagai sasaran utama program.

Namun, di sisi lain terdapat faktor pendukung dalam implementasi program ini. Faktor pertama adalah regulasi yang jelas, di mana regulasi Program AUTP memberikan pedoman dan panduan resmi dari Kementerian Pertanian, sehingga semua pihak terkait memiliki acuan yang seragam di seluruh Indonesia. Faktor kedua adalah kemudahan akses teknologi dalam pendaftaran program, di mana petani dapat mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) dengan bantuan penyuluh pertanian.

Di sisi lain, faktor penghambat utama dalam implementasi Program AUTP di Kecamatan Pauh Duo meliputi ketentuan standar klaim yang dinilai terlalu tinggi serta kurangnya sosialisasi secara berkala kepada petani. Dalam pelaksanaannya, syarat klaim 70% tingkat kerusakan lahan menjadi hambatan utama bagi petani, karena banyak petani yang mengalami

kerugian di bawah batas tersebut tidak mendapatkan kompensasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara rutin menyebabkan masih banyak petani yang belum memahami secara menyeluruh manfaat dan prosedur program ini.

Dengan demikian di sarakan pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi petani di berbagai daerah, dan dapat dirangkum dalam beberapa saran berikut : (1) Menetapkan target pencapaian program, (2) (3) Melaksanakan sosialisasi yang terjadwal dan berkelanjutan, (4) Melakukan revisi terhadap ketentuan klaim, (5) Meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono, (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta.
- Ambran sulaiman andi, dkk (2018), Asuransi Pengayom Petani, IA ARD PRESS, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta: Anggara, & Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Abdul Wahab, Solichin 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Jakarta : FIA.
- Bambang Sunggono, (2004). Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002
- Darmawi Herman, Drs., 2010, Manajemen Risiko, Jakarta: PT Bumi Aksara
- _____, 2000, Manajemen Asuransi, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC:Congresional Quarterly Press
- Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Media Komputindo
- Hanif, Nurcholis, 2007. Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta:Grasindo
- Rastuti, T., 2018. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Media Pressindo
- Salim Abbas, Drs. H. M.A. 2007, Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suratiyah, K., 2015. Ilmu Usaha tani. Jakarta: Penebar Swadaya
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, Ag, 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Pasaribu, S.M., 2014. Penerapan Asuransi Pertanian di Indonesia. Badan Litbang Pertanian, hlm, 491.
- Kementerian Pertanian. 2016. Kebijakan Dasar Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2017. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. 2017. Pedoman Bantuan Premi AUTP. Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Peraturan Menteri Pertanian No.40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S587/MBU/09/2015
- Laporan Daftar Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
- Pedoman Asuransi Usaha Tani Padi 2023
- Qomara, K. F. (2021). Analisis Persepsi Petani di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) sebagai Sebuah Inovasi (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Djunedi, P. (2016). Analisis asuransi pertanian di Indonesia: konsep, tantangan dan prospek. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(1), 9-27.\
- Ambran sulaiman andi, dkk (2018), Asuransi Pengayom Petani, IA ARD PRESS, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta
- Adriana, D., Gedeona, H. T., & Nurliawati, N. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 2(2), 71-80.
- Puspitasari, N. F., & Yuanjaya, P. (2024). Evaluasi Program Asuransi Usahatani Padi Di Kecamatan Adimulyo Dan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 9(2), 13.
- Febriani, U. (2022). *Evaluasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Pati* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Irfan, M. (2019). Evaluasi Dampak Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Tahaani Era Delyana. (2022), Skripsi : Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kaitannya Dengan Persepsi Dan Kesiediaan Membayar Petani Di Desa Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang.